

DISBUD DIY ADAKAN PAWIYATAN JAWA Keprihatinan Terhadap Situasi Sosial Budaya



Cahyo Widayat SH MSI dan Setya Amrih Prasaja SS saat membuka Pawiyatan Jawa.

YOGYA (KR) - Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Pawiyatan Jawa, Senin-Rabu (26-28/2). Materi kegiatan Pawiyatan Jawa ini meliputi Kawruh Aksara Jawa, Kawruh Bahasa Jawa, dan Kawruh Busana Jawa.

Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY, Dian Lakshmi Pratiwi SS MA dalam sambutan pembukaan yang dibacakan Sekretaris Dinas Kebudayaan DIY, Cahyo Widayat SH MSI mengatakan, kegiatan Pawiyatan Jawa ini sudah dilaksanakan mulai tahun 2021 dengan peserta dari berbagai elemen masyarakat.

tegis, diharapkan para peserta ToT Pawiyatan Jawa 2024 ini dapat menjadi pelatih di organisasi masing-masing sesuai mendapatkan materi Pawiyatan Jawa.

Dikatakan, Pawiyatan Jawa merupakan sebuah pemikiran yang lahir dan tumbuh dari rasa keprihatinan terhadap situasi sosial budaya bangsa, ketika intoleransi dan kekerasan menjadi potret sehari-hari.

Menyikapi hal tersebut, menurut Dian, kita dapat mengantisipasi sebab

kita mempunyai akar budaya yang adihuhung, yaitu budaya Jawa. Budaya Jawa selama ini terlupakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga istilah 'wong Jawa ilang Jawane' menjadi sebuah sinisme yang tersirat. "Inilah yang menjadi bahan pemikiran dibentuk dan diselenggarakan Pawiyatan Jawa," katanya pula.

Penguasaan bahasa Jawa tidak lepas dari pembelajaran aksara Jawa dan teknik wicaranya. Selain itu, pemahaman penggunaan busana dan aksesorisnya menjadi pelengkap penguasaan budaya Jawa seutuhnya. "Melalui pemahaman budaya Jawa yang meliputi aksara, teknik wicara, dan busana, diharapkan bisa membantu mengenal diri dan lingkungannya serta mampu meningkatkan potensi bangsa," katanya.

Sedangkan Kasi Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan DIY, Setya Amrih Prasaja SS mengatakan, kegiatan Pawiyatan Jawa menghadirkan narasumber Joko Elysanto (Praktisi/Pegiat Aksara Jawa), Faizal Noor Singgih (Praktisi), dan Rr Noor Dwi Artyandari (Praktisi).

Menurut Amrih, dalam kegiatan Pawiyatan Jawa ini Joko Elysanto menyampaikan tentang sejarah aksara Jawa, tata tulis aksara, dan aksara Jawa di ranah digital.

Sedangkan Faizal Noor Singgih menyampaikan tentang wicara, salah kaprah basa, bausastra prasaja, kawruh dasanama, tuladha pranatacara lan sesorah. Sementara Rr Noor Dwi Artyandari menyampaikan tentang sejarah busana, perangkat busana, motif batik, tata cara mengenakan busana Jawa, dan pengenalan busana Jawa gagrag Ngayogyakarta.

"Melalui kegiatan Pawiyatan Jawa ini, peserta diharapkan menjadi trainer atau bisa menyebarkan ilmu yang didapatkan pada kegiatan Pawiyatan Jawa," kata Amrih.

Target kegiatan ToT Pawiyatan Jawa, lanjut Amrih, agar ilmu yang didapatkan oleh peserta tidak hanya berhenti setelah Pawiyatan Jawa saja, tapi ilmu yang didapatkan dalam kegiatan tersebut dapat disebarluaskan lagi kepada paguyuban, masyarakat desa, instansi dan lain-lain. (Wan)



Pawiyatan Jawa digelar dengan konsep Training of Trainer.

KR-Wawan Isnawan

DIGELAR PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY Peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara

YOGYA (KR) - Peristiwa bersejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 yang ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, tanggal 24 Februari 2022, merupakan bagian penting perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Sejarawan UGM Julianto Ibrahim SS MHum mengatakan, esensi Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI dan Republik Indonesia masih ada.

Sebab, lanjut Julianto, Van Royen selaku wakil Belanda di PBB selalu meyakinkan dunia internasional bahwa agresi militer yang mereka lakukan dapat diterima oleh rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia tidak melakukan penolakan terhadap Belanda yang waktu itu menguasai ibukota Yogyakarta dan kota-kota besar lainnya di Jawa dan Sumatera.

Sri Sultan HB IX yang mendengarkan siaran radio dari BBC London mengenai Sidang Umum PBB yang akan diadakan akhir Februari 1949, mempunyai inisiatif untuk melakukan sebuah serangan serentak terhadap kedudukan Belanda di Yogyakarta yang dilakukan pada siang hari.

"Serangan dimaksudkan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah dan TNI masih ada, dan tidak setuju terhadap aksi-aksi agresi yang dilakukan oleh Belanda," kata Julianto, anggota Penyusun Naskah Akademik Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Pada awal Februari 1949, Sultan HB IX kemudian mengusulkan kepada Jenderal



Julianto Ibrahim SS MHum

Sudirman yang sedang bergelutnya melalui surat yang dibawa kurir untuk melakukan serangan umum terhadap Belanda yang dilakukan siang hari.

"Panglima Besar Jenderal Sudirman menyetujui usulan Sri Sultan HB IX dan memerintahkan untuk berkoordinasi dengan komandan setempat, yaitu Letkol Suharto selaku komandan Wehrkreise III," kata Julianto.

Pada 13 Februari 1949, pukul 23.00-24.00, lanjut Julianto, dilakukan pembicaraan antara Sultan HB IX dengan Letkol Suharto di rumah Pangrangan Prabuningrat mengenai rencana serangan umum.

Pembicaraan itu menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain, serangan akan dilakukan dua minggu kemudian. Serangan dipimpin oleh Komandan Wehrkreise III yaitu Letkol Suharto dengan menggunakan simbol pengenalan yaitu janur kuning atau kata sandi 'Mataran' dijawab 'menang'.

Pada 1 Maret 1949, pukul 06.00, kurang lebih 2000 pasukan TNI menyerang kedudukan Belanda di kota Yog-

yakarta. Belanda yang bermarkas di Benteng Vredenburg serta di Jalan Malioboro dan sekitarnya dikepung oleh pasukan TNI dari empat penjuru mata angin. Serangan itu berakhir pada pukul 13.00 setelah pasukan NICA dari Semarang berhasil memasuki Yogyakarta.

Berita serangan umum ini, kata Julianto, segera diberitakan melalui radio AURI di Playen Wonosari dan dipancarkan ke seluruh dunia, sehingga dunia tahu bahwa pemerintah Indonesia dan TNI masih ada. Hal ini berakibat, PBB mendesak Belanda untuk melakukan perundingan yang bermuara pada pengakuan kedaulatan Bangsa Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar, 27 Desember 1949.

Memperingati Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Kaistimewan DIY dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY menyelenggarakan acara Sinau Sejarah Kaistimewan '1 Maret, Hari Penegakan Kedaulatan Negara', Jumat (1/3), pukul 13.00-16.00 di Aula SMA Negeri 10, Jalan Gadean No 5, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta, dan ditayangkan live streaming melalui channel YouTube Paniradya Kaistimewan DIY.

Acara Sinau Sejarah Kaistimewan '1 Maret, Hari Penegakan Kedaulatan Negara' akan diawali pemutaran video dokumenter berjudul 'Jajak-jajak Perjuangan', dilanjutkan Dialog Kaistimewan 'Hari Penegakan Kedaulatan Negara'.

Selain itu, acara ini juga diakhiri pentas tari dan musik siswa SMA Negeri 10 serta penampilan bintang tamu. (Wan)

SANTUNAN BAGI PETUGAS PEMILU Pemerintah Berikan Bantuan Rp 2,6 M

JAKARTA (KR) - Pemerintah memberikan santunan bagi 44 ahli waris petugas ad-hoc pemilihan umum (pemilu) yang meninggal dunia dan mengalami kecelakaan kerja/sakit, yang dibayarkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan total anggaran Rp 2,6 miliar.

"BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat Jaminan Kematian (JKM) kepada 35 kasus dan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada sembilan kasus," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy saat simbolisasi penyerahan bantuan di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/2).

Mereka yang mendapatkan santunan adalah petugas yang terdaftar kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan. Adapun keseluruhan petugas pemilu yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.061.428 orang. Dari jumlah tersebut yang terdaftar melalui KPU sebanyak 960.673 orang dan melalui

Bawaslu 100.755 orang. Sementara dari data Kemenkes, petugas yang meninggal 114 orang.

Muhadjir mengatakan, penyerahan santunan ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan penghargaan atas pengabdian para petugas ad-hoc pemilu.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pemberian santunan kepada ahli waris nominalnya berbeda-beda. BPJS Ketenagakerjaan membagi ke dalam tiga kategori yakni

meninggal saat bertugas (14 Februari), meninggal sebelum bertugas dan yang masih menjalani perawatan.

Untuk meninggal saat bertugas diberikan santunan sekitar 48 dikali gaji/upah yang diterima, sementara meninggal sebelum bertugas sebesar Rp 42 juta/orang. "Ditambah beasiswa pendidikan mulai dari pendidikan dini hingga jenjang pendidikan tinggi, bagi anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya saat bertugas," kata Eko.

(Ati)-f



KR-Rini Suryati

Menko PMK Muhadjir Effendy didampingi Anggota Komisiner Bawaslu RI Herwyn Malonda, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Deputi 2 KSP Abednego Tarigan serta para ahli waris penerima santunan dari petugas Pemilu 2024.

JAGA STABILITAS HARGA Kebijakan Pemerintah Kunci Pengendalian Inflasi

YOGYA (KR) - Falsafah ekonomi Keynesian, mengajarkan pentingnya peran Pemerintah dalam mengatur ekonomi, salah satunya untuk mencapai stabilitas harga. Hal itu sangat relevan, dimana intervensi Pemerintah melalui kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci dalam mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu penting bagi Pemerintah untuk terus melaksanakan kebijakan yang konsisten dan responsif, terhadap dinamika ekonomi yang senantiasa berubah. "Di tengah dinamika ekonomi global, DIY telah menunjukkan kemampuannya dalam mengelola inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penurunan inflasi dari 6,49 persen pada 2022 menjadi 3,17 persen di 2023, dan pencapaian deflasi -0,02 persen di awal 2024, adalah bukti nyata keberhasilan kebijakan dan upaya kita bersama," kata Wakil Gubernur DIY Paku Alam X dalam acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Dae-

rah (TPID) DIY di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Selasa (27/2).

Wagub DIY mengungkapkan, meski kondisi di DIY dapat dikatakan baik, namun jalan menuju kesejahteraan rakyat yang hakiki masih panjang dan membutuhkan kerja keras, serta sinergi semua pihak. Proses itu membutuhkan kerja sama erat antara Pemerintah, produsen, dan distributor, untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Ramadan dan Idul Fitri.

"Saat ini, isu harga dan ketersediaan beras menjadi trending topic masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya jangka pendek dan jangka panjang, guna mengantisipasi dan mengendalikan stok beras, baik di sisi hulu dan hilirnya," imbuh Paku Alam X.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY Ibrahim menyatakan, soal isu terkini yaitu harga beras yang melambung tinggi, BI DIY merekomendasikan langkah mitigasi yang bersifat seasonal. Langkah pertama, mengedukasi masyarakat untuk meminimalisasi food waste dan belanja bijak. Juga memperkuat kerja sama antardaerah intra provinsi untuk panen raya beras yang diperkirakan berlangsung Maret.

"Kita bisa memanfaatkan digitalisasi melalui website TPID DIY untuk monitoring pasokan dan harga beras secara real time. Kita juga bisa meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha terkait harga jual yang wajar dan pola distribusi yang lancar," jelasnya. (Ria)-f

PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA SAH Praperadilan Siskaeer Ditolak

JAKARTA (KR) - Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan tersangka kasus film porno, Francisca Candra Novitasari atau Siskaeer. Dengan putusan PN Jakarta Selatan tersebut, penetapan Siskaeer sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dinyatakan sah.

"Mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Tunggal PN Jaksel Sri Rejeki Marsinta saat membacakan amar putusan di Jakarta, Selasa (27/2).

Dalam pertimbangannya, Hakim Sri Rejeki menilai semua persyaratan penetapan sebagai tersangka kepada Siskaeer oleh Penyidik Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan peraturan yaitu adanya dua alat bukti. Untuk itu, semua permohonan yang diajukan pemohon dalam pra-

peradilan tersebut ditolak serta semua biaya pada persidangan dibebankan kepada pemohon. "Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar biaya persidangan sebesar nihil," tuturnya.

Sementara kuasa hukum tersangka Siskaeer, Tofan Agung Ginting mengatakan dengan telah di putusnya praperadilan tersebut, maka pihaknya akan fokus pada pokok perkara. Saat persidangan praperadilan, semua bukti telah disampaikan kepada hakim, namun ada satu saksi yang tidak bisa hadir dan itu yang menjadi penyebabnya. "Kami sudah meng-

ajukan bukti surat, dan saksi fakta dari pemohon namun tidak hadir karena sakit. Kami sangat menghormati putusan ini. Untuk itu, kami akan mendampingi Siskaeer fokus ke pokok perkara saja," katanya. (Ant/Has)-f



KR-Antara/Indragiri Eko Suwarsa
Francisca Candra Novitasari atau Siskaeer

TERKAIT PENYITAAAN TELEPON SELULER PN Jaksel Tolak Praperadilan Aiman

JAKARTA (KR) - Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Aiman Witjaksono atas penyitaan telepon genggam, kartu SIM, akun media sosial dan email oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa surat penetapan penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sah.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Delta Tama di Jakarta saat membacakan putusan gugatan praperadilan tersebut, Selasa (27/2).

Menurut Delta, penyitaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrim) Polda Metro Jaya sah. Sehingga petitiun yang diajukan oleh pemohon dari angka satu sampai lima dinyatakan ditolak seluruhnya. "Menimbang bahwa permohonan pemohon ditolak, maka pemohon adalah pihak yang dikalahkan. Maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah nihil," tuturnya.

Sidang praperadilan antara pemohon Aiman Witjaksono dan termohon penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya hanya berlangsung tujuh hari. Aiman Witjaksono mengajukan permohonan praperadilan kepada PN Jaksel terkait penyitaan telepon genggam, media sosial dan email oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, karena dinilai cacat hukum formil. (Ant/Has)-f

SOAL KUA UNTUK SEMUA AGAMA

Menko PMK Dukung Menag

JAKARTA (KR) - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mendukung rencana menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat menikah semua agama. Rencana tersebut merupakan ide bagus lantaran semua agama bisa mendapatkan pelayanan yang sama.

"Namanya aja KUA, Kantor Urusan Agama bukan Kantor Urusan Agama tertentu, KUA bukan KUI karena itu kalau semua agama mendapatkan pelayanan yang sama di satu kantor itu saya kira bagus," ujar Muhadjir Effendy di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (27/2).

Muhadjir menyebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan hal teknis. Dalam aturan itu, pernikahan muslim dicatat KUA, sementara umat agama lainnya dicatat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. "Secara administratif di bawah Dirjen Bimas Masyarakat Islam kan, tetapi untuk fungsinya kan bisa semua, enggak ada masalah," katanya.

Namun demikian, kalau tidak bersedia juga tidak apa-apa. "Wong ini dibolehkan sifatnya kan sukarela tapi dimungkinkan untuk semua agama. Saya kira bagus terobosan dari Pak Menteri Agama itu harus kita dukung," imbuhnya.

Sebelumnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas merencanakan KUA selain menjadi tempat pencatatan pernikahan bagi umat muslim, juga akan dijadikan tempat pencatatan pernikahan bagi umat non-muslim. "Kita sudah sepakat sejak awal, bahwa KUA ini akan kita jadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama. KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama," ucapnya. (Ati)-f